

TRIWULAN KEDUA, REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) EMPAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI JEPARA TAK PENUHI TARGET



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/07/image-20240711110541.jpg>

Isi Berita:

BETANEWS.ID, JEPARA – Memasuki triwulan kedua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menargetkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai 40 persen. Namun terdapat empat OPD yang realisasi PAD belum memenuhi target.

Florentina Budi Kurniawati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara mengatakan empat OPD tersebut yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskan), Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Untuk DPUPR hingga triwulan kedua baru terealisasi 37,7 persen; Diskominfo 35,5 persen; Diskan 11,9 persen, dan Diskopukmnakertrans 23,9 persen.

“DPUPR tidak tercapai karena Gedung Wanita dan Stadion GBK ini kan sedang direnovasi, kemudian kalau Diskominfo karena sekarang sudah tidak ada pemasukan dari Majalah Gelora,” katanya Jum’at (12/7/2024).

Namun secara keseluruhan, ia menyebut realisasi PAD di Triwulan kedua pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 18,9 persen dibanding triwulan kedua pada tahun lalu.

Pada triwulan kedua di tahun ini, realisasi PAD sudah tercapai sebesar 49,2 persen atau sekitar Rp1,2 miliar dari target sekitar Rp2,4 miliar.

Jumlah ini didapat dari PAD sebesar Rp232 miliar dari target sebesar Rp466 miliar. Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp909 miliar dan Pendapatan Transfer Propinsi sebesar Rp74 miliar.

“Semuanya naik kecuali transfer dari propinsi yang minus 9,2 persen,” katanya.

Sejumlah OPD yang pendapatannya melampaui target diantaranya BPKAD, DKK, Dishub, DLH, Disperkim, Disindag, Disparbud dan DKPP.

Sementara itu, Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta mengapresiasi sejumlah perangkat daerah yang sudah bisa menaikkan pendapatannya.

“Terima kasih kepada perangkat daerah yang sudah bisa menaikkan target pendapatan. Yang lain yang belum memenuhi target segera untuk dikejar,” katanya.

Kemudian ia meminta para pimpinan perangkat daerah meneguhkan komitmennya dalam memenuhi target pendapatan yang sudah ditetapkan diawal.

“Para pimpinan perangkat daerah harus berkomitmen penuh. Jangan sampai malah di APBD Perubahan mengajukan penurunan target,” tegasnya. (Umi Nurfaizah)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2024/07/triwulan-kedua-realisasi-pad-empat-opd-di-jepara-tak-penuhi-target.html>, “Triwulan Kedua, Realisasi PAD Empat OPD di Jepara Tak Penuhi Target”, tanggal 13 Juli 2024.
2. <https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/418297/4-opd-di-jepara-minta-target-pad-diturunkan-pj-bupati-tak-setuju>, “4 OPD di Jepara Minta Target PAD Diturunkan, Pj Bupati Tak Setuju”, tanggal 11 Juli 2024.
3. <https://klikfakta.com/2024/07/realisasi-pendapatan-daerah-jepara-triwulan-ii-hampir-sentuh-50-persen/>, “Realisasi Pendapatan Daerah Jepara Triwulan II Hampir Sentuh 50 Persen”, tanggal 12 Juli 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05